

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 2

SUBBAGIAN HUMAS



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak
Media Online	Halo Semarang

Wilayah: Kabupaten Blora

Pemkab Blora Anggarkan Rp3,1 Miliar untuk Penanganan Longsor 2022

<https://halosemarang.id/pemkab-blora-anggarkan-rp31-miliar-untuk-penanganan-longsor-2022>

HALO BLORA – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, telah mengalokasikan anggaran lebih kurang Rp 3,1 miliar untuk pembangunan tanggul guna penanganan longsor di beberapa lokasi prioritas Kabupaten Blora.

Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk menangani bencana tanah longsor yang berdampak terhadap potensi kerusakan infrastruktur jalan dan permukiman di wilayah kecamatan Sambong dan Kecamatan Blora.

Hal itu dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blora "Sesarengan Mbangun Blora yang Unggul dan Berdaya Saing" melalui perwujudan misi yang ketiga yaitu mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan.

Kepala Dinas DPUPR Kabupaten Blora, Ir Samgautama Karnajaya MT membenarkan dan menegaskan bahwa di tahun anggaran 2022 ini mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih Rp 3,1 miliar yang berada di Bidang Sumber Daya Air (SDA) untuk kegiatan penanganan longsor sungai Giyanti Kecamatan Sambong dan penanganan longsor sungai Glagahan Kec. Blora.

"Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun konstruksi talud dan tanggul untuk mengembalikan tanggul di kedua sungai tersebut, yang rusak akibat gerusan air," jelasnya, Rabu (16/3/2022), seperti dirilis *Blorakab.go.id*.

Sehingga, nantinya bisa mencegah bencana tanah longsor disekitar lokasi konstruksi tidak akan terulang lagi dan dapat mengembalikan tanggul sungai ke kondisi semula.

Sementara itu, Kabid SDA DPUPR Surat, ST, MT menjelaskan bahwa penanganan longsor akan difokuskan untuk menangani longsor sungai Giyanti Kec. Sambong dianggarkan kurang lebih Rp2,3 miliar dan penanganan longsor sungai Glagahan dianggarkan kurang lebih Rp931 juta.

Menurut Surat, progres kegiatan saat ini masih dalam proses penyusunan DED.

"Kemarin sudah kami lakukan peninjauan lapangan bersama dengan pemerintah Desa Giyanti untuk kepastian lokasi titik longsor sungai Giyanti," terangnya.

Dikatakan Surat, ada dua titik lokasi yang mengalami longsor yang berdampak terhadap potensi kerusakan jalan utama desa dan berdampak terhadap lingkungan permukiman.

"Dari hasil kunjungan kami di lapangan, karena keterbatasan anggaran akan kami prioritaskan dulu di titik lokasi yang berdampak terhadap longornya badan jalan utama ruas jalan Ngroto-Giyanti yang berada di desa Giyanti," ungkapnya.

Hal itu untuk memastikan jalan utama tersebut nanti tetap dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung kelangsungan distribusi dan transportasi masyarakat desa Giyanti Kecamatan Sambong.

"Dari hasil kunjungan survei lapangan tersebut selanjutnya akan segera kami tindaklanjuti dengan melaksanakan perencanaan DED konstruksinya. Doakan saja nanti sekitar bulan Agustus kiranya sudah bisa dilaksanakan pekerjaan konstruksinya," kata Surat.

Sedangkan, untuk yang titik lokasi longsor sungai Glagahan, berada di dukuh Jasem Desa Jempangrejo Kecamatan Blora. (HS-08).

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH